

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik merupakan organisasi bersifat non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Organisasi sektor publik berorientasi pada pemberian pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah semua lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik itu di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, dan badan yang mendapat dana dari APBN/APBD.

Akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan agar dapat menciptakan *good governance*. Berhubungan dengan hal tersebut salah satu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah negara agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Isnanto *et al.*, 2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun demi mewujudkan kewajiban kinerja instansi pemerintah yang akuntabel. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pemerintah daerah kabupaten atau kota menyampaikan LAKIP sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapat nilai akuntabilitas kinerja CC yang artinya Cukup. Pada tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Probolinggo mendapat nilai B yang artinya Baik. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi BB yang artinya sangat baik. Selain itu, pada tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Probolinggo meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan peringkat BB. Dari tahun ketahun Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menerus melakukan peningkatan dalam hal peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebagai usaha dalam melakukan peningkatan kinerja, pada tahun 2020 dilaksanakannya kegiatan *refresh* SAKIP yang diikuti sebanyak 13 orang dari Inspektorat, 10 orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan 6 orang dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini digelar oleh Pemkab Probolinggo sebagai tahapan untuk meraih nilai SAKIP A.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pengendalian Intern, dan Motivasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulfiandri (2017) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur, penerapan akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan kualitas laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Handayani (2019) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut

juga menyebutkan bahwa variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 variabel yang paling mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Antara lain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel tersebut merupakan variabel yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten probolinggo.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut, sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Pratama *et al.*, 2019).

Pengendalian akuntansi berfungsi pada instansi pemerintah sebagai pengontrol seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi (Pratama *et al.*, 2019). Pengendalian akuntansi digunakan untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah telah terlaksana dengan ekonomis, efisien, dan efektif kepada masyarakat, hal ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan prestasi sebagai peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Pratama *et al.*, 2019).

Variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Menurut Hidayattullah (2013) sistem pelaporan merupakan laporan dengan menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). LAN dan BPKP mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola dana publik harus

mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya (Pratama *et al.*, 2019).

Penelitian ini ingin meneliti dan mengetahui apakah faktor-faktor internal yang telah disebutkan benar-benar berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Probolinggo. Hal tersebut pula yang melatar belakangi penelitian ini memilih judul PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui pengaruh signifikan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Mengetahui pengaruh signifikan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

#### **1.4 Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

2. Manfaat bagi instansi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan terhadap instansi pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan lebih baik lagi kedepannya.